

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Profil Pembangunan Daerah tahun 2024 disusun dalam rangka memvisualisasikan kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir, yang memuat antara lain kondisi umum daerah, kondisi sosial ekonomi, potensi daerah, perencanaan penganggaran, dan capaian indikator makro. Data tersebut disajikan dalam bentuk data statistik baik statistik dasar maupun statistik sektoral, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi hasil-hasil pembangunan, serta dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah kedepannya.

Diharapkan data-data yang disajikan dalam Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang membutuhkan, baik masyarakat, *stakeholder* terkait maupun penentu kebijakan dalam perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024. Kritik dan saran dari seluruh pihak sangat dibutuhkan, sehingga kedepannya kualitas profil pembangunan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan serta dilakukan upaya penyempurnaan.

Selayar, 2025

KEPALA BAPPERIDA,

Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	3
1.4. Sistematika Dokumen	4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	6
2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	6
2.2. Pemerintahan.....	8
2.3. Penduduk	10
BAB III KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	14
3.1. Pembangunan Manusia.....	14
3.2. Kesejahteraan Masyarakat	16
BAB IV POTENSI DAERAH.....	27
4.1. Potensi Daerah.....	27
4.2. Sarana dan Prasarana.....	40
BAB V PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH	47
5.1. Pertumbuhan Ekonomi	47
5.2. PDRB Perkapita.....	48
5.3. Gini ratio.....	50
5.4. Persentase Penduduk Miskin.....	51
5.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	52
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	54
6.1. Perencanaan Pembangunan Daerah	54
6.2. Keuangan Daerah.....	61
BAB VII PENUTUP	68
7.1. Kesimpulan.....	68
7.2. Rekomendasi.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	7
Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	8
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	9
Tabel 2. 4 Jumlah PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan tahun 2021-2023	9
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	10
Tabel 2. 6 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	11
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022	12
Tabel 3. 1 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	15
Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023.....	17
Tabel 3. 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	19
Tabel 3. 4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	19
Tabel 3. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	20
Tabel 4. 1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	27

Tabel 4. 2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	28
Tabel 4. 3 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022	29
Tabel 4. 4 Produksi Buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	30
Tabel 4. 5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022	31
Tabel 4. 6 Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	32
Tabel 4. 7 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022	33
Tabel 4. 8 Lokasi Ekowisata di Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	37
Tabel 4. 9 Jumlah Pengunjung di Taman Nasional Takabonerate tahun 2022	38
Tabel 4. 10 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	39
Tabel 4. 11 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	40
Tabel 4. 12 Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	41
Tabel 4. 13 Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	42
Tabel 4. 14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	43
Tabel 4. 15 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	44
Tabel 4. 16 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022.....	45
Tabel 4. 17 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	45

Tabel 5. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023.....	47
Tabel 5. 2 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023	49
Tabel 5. 3 Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023.....	50
Tabel 5. 4 Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023	51
Tabel 5. 5 Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2023.....	52
Tabel 6. 1 Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	61
Tabel 6. 2 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	62
Tabel 6. 3 Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	65
Tabel 6. 4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	15
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	22
Grafik 3. 3 Indikator Kemiskinan Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023	22
Grafik 3. 4 Gini Rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	24
Grafik 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023.....	25
Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023.....	26
Grafik 4. 1 Produksi Padi Sawah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023	28
Grafik 4. 2 Banyaknya Tamu Hotel/ Akomodasi/ Penginapan Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2022.....	35
Grafik 4. 3 Jumlah Penumpang Melalui Bandara Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2022.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dalam satu kesatuan dan keterkaitan antar wilayah, maka perlu dilakukan melalui pendekatan teknokratik, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Bab III, Pasal 7 (tujuh) menjelaskan bahwa Bappeda sebagai pengelola informasi pembangunan daerah sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pembangunan daerah membuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profil pembangunan daerah serta informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyediaan data dan informasi oleh pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Hal inilah yang mendasari Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan. Profil pembangunan daerah dapat memberikan gambaran mengenai hasil pelaksanaan program pembangunan daerah serta dapat digunakan untuk menilai potensi sumber daya alam, manusia dan hasil kegiatannya.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1114);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah untuk menyajikan data dan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar penyusunan program pembangunan pada tahun berikutnya. Publikasi ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sumber informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan prospek pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar kedepan;

2. Tersedianya data yang valid dan dapat diakses oleh semua pihak; dan
3. Memberikan kemudahan dalam menetapkan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4. Sistematika Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan gambaran singkat tentang pentingnya profil pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Menjelaskan tujuan dan manfaat penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Dokumen Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar

Memberikan gambaran struktur penyusunan profil pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar serta garis besar isi setiap bab.

BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Menjelaskan dan menyajikan data tentang kondisi geografis daerah yang meliputi luas wilayah dan batas wilayah administratif, serta keberadaan pulau dan sebarannya.

2.2. Pemerintahan

Menyajikan data dan penjelasan tentang wilayah administratif serta sistem pemerintahan.

2.3. Penduduk

Menyajikan data dan penjelasan tentang jumlah, sebaran dan kepadatan penduduk.

BAB III. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

3.1. Pembangunan Manusia

Memberikan data dan penjelasan tentang aspek pembangunan manusia yang meliputi Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita yang disesuaikan.

3.2. Kesejahteraan Masyarakat

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi yang antara lain mencakup indikator laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita, kemiskinan dan indeks gini.

3.3. Ketenagakerjaan

Memuat penjelasan tentang kondisi ketenagakerjaan yang antara lain mencakup indikator angkatan kerja dan pengangguran terbuka.

BAB IV. POTENSI DAERAH

Memberikan penjelasan dan data terkait potensi daerah yang dapat dikembangkan, meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri dan perdagangan.

BAB V. PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

Menyajikan data dan penjelasan terkait perbandingan indikator makro dengan kabupaten/kota lain dalam wilayah setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

BAB VI. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Memuat penjelasan tentang siklus perencanaan dan penganggaran, prioritas pembangunan dan capaian kinerja pembangunan.

BAB VI. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan semua wilayah daratannya terpisah dari pulau Sulawesi. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km², dan luas wilayah laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak diantara 5°40' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur, Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 130 Pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi adalah pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain : Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 34 buah, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

Terkait dengan posisi strategis Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana termuat dalam website sulselprov.go.id bahwa Selat Selayar dilintasi pelayaran nusantara baik ke Timur maupun ke Barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan Barat-Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan ALKI III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia. Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan Utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan Selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Takabonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pulau
1	Pasimarannu	195,33	15
2	Pasilambena	114,88	16
3	Pasimasunggu	131,8	21
4	Takabonerate	49,3	29
5	Pasimasunggu Timur	67,14	5
6	Bontosikuyu	248,22	29
7	Bontoharu	128,12	8
8	Benteng	24,63	-

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Pulau
9	Bontomanai	136,42	-
10	Bontomatene	193,05	6
11	Buki	68,14	-
Kepulauan Selayar		1.357,03	130

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.2. Pemerintahan

Dalam rangka percepatan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui upaya pelayanan secara professional, efektif dan berkeadilan, diperlukan peningkatan kapasitas, penataan administrasi dan manajemen pemerintahan yang bertumpu pada nilai-nilai dan paradigma pemerintahan yang baru. Dalam menjalankan pemerintahan, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi dalam 11 Kecamatan, 81 Desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomatene dengan jumlah desa sebanyak 12 Desa/Kelurahan.

Tabel 2. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No	Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km ²)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Pasimaranu	± 140	8
2	Pasilambena	± 193	6
3	Pasimasunggu	± 85	7
4	Takabonerate	± 75	9
5	Pasimasunggu Timur	± 96	6
6	Bontosikuyu	± 18	12
7	Bontoharu	± 3	8
8	Benteng	± 0	3
9	Bontomanai	± 18	6
10	Bontomatene	± 27	10
11	Buki	± 19	5

Sumber: Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka, 2025

Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara atau pelayan publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan, dibutuhkan SDM aparatur yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pada tahun 2024, jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3.237 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.235 orang dan perempuan sebanyak 2.002 orang. Tabel 2.3 berikut menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Commented [D1]: SELAYAR DALAM ANGKA HAL 33

No.	Jenis Kelamin	Pegawai Negeri Sipil (Orang)			
		2021	2022	2023	2024
1	Laki-laki	1.448	1.457	1.320	1.235
2	Perempuan	2.167	2.337	2.076	2.002
	Jumlah	3.615	3.794	3.396	3.237

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Jika dilihat dari golongannya, PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, didominasi oleh Golongan III dengan jumlah sebesar 2.221 orang dan berturut-turut adalah Golongan IV sebanyak 774 orang, Golongan II sebanyak 234 orang dan Golongan I sebanyak 8 orang. Sedangkan menurut tingkat pendidikannya, yang terbesar adalah PNS berpendidikan Sarjana/ Doktor/ Ph.D dengan jumlah 2.470 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2021-2024

Commented [D2]: SELAYAR DALAM ANGKA HAL 39

Uraian	Pegawai Negeri Sipil (Orang)			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah PNS Menurut Golongan				
Golongan I	20	10	10	8
Golongan II	605	526	511	234
Golongan III	2.232	2.453	2.206	2.221
Golongan IV	758	805	808	774
Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan				
Sampai dengan SD	9	9	5	3
SMP/ Sederajat	20		10	10
SMA/ Sederajat	593	552	523	383
Diploma I, II, III/ Akta I, II, III	571	502	443	371
Sarjana/ Doktor/ Ph.D	2422	2.730	2.470	2.470
Jumlah PNS	3.615	3.794	3.396	3.237

Commented [D3]: SELAYAR DALAM ANGKA HAL 36

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

2.3. Penduduk

Berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Perluasan analisis khususnya bidang kependudukan akan terus berkembang seiring dengan makin majunya peradaban manusia. Oleh karena itu, tersedianya data kependudukan yang akurat dan tepat waktu sangat dibutuhkan oleh para perencana pembangunan dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya, misalnya untuk merencanakan penyediaan sarana umum, perumahan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, tempat rekreasi dan lainnya.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 143.096 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 24.378 jiwa. Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif rendah dan fluktuatif. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 adalah 137.974 jiwa, kemudian pada tahun 2022 tumbuh menjadi 139.145 jiwa, tahun 2023 menjadi 142.100 jiwa, dan tahun 2024 menjadi 143.096 jiwa atau laju pertumbuhan penduduk tahun 2021-2024 sebesar 3,71 persen. Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Commented [D4]: 61

KECAMATAN	2021	2022	2023	2024
Pasimarannu	10.603	10.736	10.951	11.065
Pasilambena	8.096	8.202	8.578	8.722
Pasimasunggu	8.702	8.782	9.261	9.433
Takabonerate	13.541	13.623	14.774	15.101
Pasimasunggu Timur	7.885	7.919	8.009	8.218
Bontosikuyu	15.328	15.381	16.030	16.164
Bontoharu	14.762	14.945	15.325	15.489

KECAMATAN	2021	2022	2023	2024
Benteng	25.096	25.397	24.514	24.378
Bontomanai	13.790	13.903	14.119	14.079
Bontomatene	13.398	13.441	13.565	13.522
Buki	6.773	6.816	6.920	6.925
Kepulauan selayar	137.974	139.145	142.100	143.096

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 adalah 105,43 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kecamatan. Kecamatan Benteng yang memiliki luas wilayah daratan sebesar 24,63 km² dihuni oleh 24.378 jiwa dan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yang mencapai 990,40 jiwa/km². Adapun daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Pasimaranu, yaitu 56,63 jiwa/km². Berikut dapat dilihat data rata-rata penduduk per desa, kepadatan penduduk per km² tahun 2021-2024.

Tabel 2. 6 Rata-Rata Penduduk Per Desa, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Kecamatan	Luas Area (Km ²)	BANYAKNYA		RATA-RATA	
		Desa	Penduduk	Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk per km ²
Pasimaranu	195,33	8	11.065	1.383	56,63
Pasilambena	114,88	6	8.722	1.454	75,91
Pasimasunggu	131,8	7	9.433	1.348	71,56
Takabonerate	49,3	9	15.101	1.678	306,26
Pasimasunggu Timur	67,14	6	8.218	1.370	122,41
Bontosikuyu	248,22	12	16.164	1.347	65,13
Bontoharu	128,12	8	15.489	1.936	120,88
Benteng	24,63	3	24.378	8.126	990,40
Bontomanai	136,42	10	14.079	1.408	103,23
Bontomatene	193,05	12	13.522	1.127	70,06
Buki	68,14	7	6.925	989	101,61
2024	1.357,03	88	143.096	1.626	105,43
2023	1.357,03	88	142.100	1.615	104,71
2022	1.357,03	88	139.145	1.991	103
2021	1.357,03	88	137.974	1.972	102

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Uraian mengenai komposisi penduduk terdiri dari komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, secara umum dapat dikatakan bahwa struktur penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk kategori sedang, Karena proporsi penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak melampaui angka 40 persen, maka pada tahun 2024, jumlah penduduk kelompok usia **0–14 tahun** sebesar **32.126 jiwa** (terdiri dari **16.541 laki-laki** dan **15.248 perempuan**) atau sekitar **22,44%** dari total penduduk. Sedangkan penduduk yang termasuk **kelompok usia produktif (15–64 tahun)** berjumlah **98.614 jiwa** atau sekitar **68,95%**. Adapun penduduk berusia **65 tahun ke atas** hanya sekitar **8,87%** atau **12.702 jiwa**, yang terdiri dari **5.428 laki-laki** dan **7.274 perempuan**. Data ini dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Seks Rasio
1	0 – 4	4.542	4.168	8.710	108,97
2	5 – 9	5.713	5.273	10.986	108,34
3	10 – 14	6.286	5.807	12.093	108,25
4	15 – 19	7.083	6.761	13.844	104,76
5	20 – 24	6.976	6.730	13.706	103,66
6	25 – 29	5.334	5.247	10.581	101,66
7	30 – 34	4.456	4.472	8.928	99,64
8	35 – 39	4.857	5.269	10.126	92,18
9	40 – 44	5.034	5.271	10.305	95,50
10	45 – 49	4.425	4.815	9.240	91,90
11	50 – 54	4.156	4.376	8.532	94,97
12	55 – 59	3.331	3.915	7.246	85,08
13	60 – 64	2.784	3.322	6.106	83,80
14	65 – 69	2.020	2.531	4.551	79,81
15	70 – 74	1.526	1.878	3.404	81,26
16	75 +	1.882	2.865	4.747	65,69
JUMLAH (KAB/KOTA)		69.907	70.405	72.700	96,84

Commented [D5]: 64

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Sex rasio Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 adalah 96,84 persen, yang dapat diartikan bahwa jumlah penduduk perempuan masih lebih besar 3,16 persen dari jumlah penduduk laki-laki atau jika terdapat 100 orang perempuan dalam suatu wilayah maka terdapat 96 atau 97 orang laki-laki.

BAB III

KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

3.1. Pembangunan Manusia

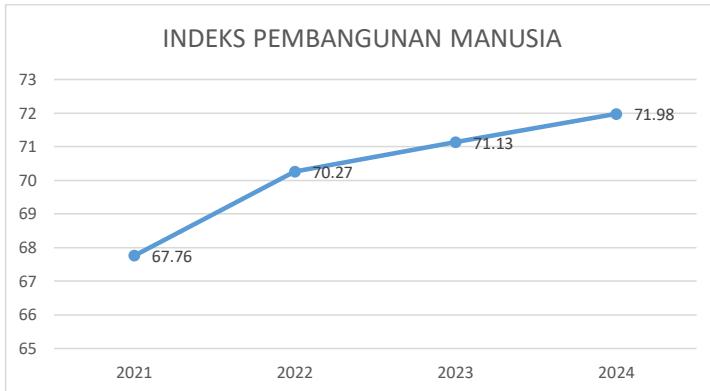
Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme (UNDP)* ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Human Development Report tahun 1990 diperkenalkan tiga indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan peningkatan atau tumbuh diatas 0,3 persen setiap tahun selama tahun 2021-2024. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekalipun menunjukkan peningkatan, dalam 3 tahun terakhir IPM Kepulauan Selayar berada pada kelompok IPM tinggi (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$). IPM Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Grafik 3.1 berikut:

Grafik 3. 1 Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Untuk mengetahui lebih detail terkait perkembangan IPM di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu melihat 4 (empat) indikator pembentuk IPM, yaitu : Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita yang disesuaikan, sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024

Dimensi	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (Tahun)	72,77	73,05	73,27	73,48
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,66	12,67	12,69	12,84
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,08	8,09	8,35	8,6
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribu Rupiah)	9.060	9.446	9.830	10.235

Commented [D6]: 397

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pada bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan pembangunan kesehatan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen dan informasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan program kesehatan tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas

Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berkat upaya pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.1 di atas bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami peningkatan dan berada pada kisaran usia 73,48 tahun, yang artinya secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,48 tahun.

Sementara pada bidang pendidikan, upaya pemerintah juga terbilang cukup baik. Berdasarkan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat dilihat peningkatan yang terjadi selama tahun 2021-2024. Angka harapan lama sekolah berkisar 12,84 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun keatas yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,84 tahun atau setara dengan Diploma 1. Sedangkan rata-rata lama sekolah berkisar 8,6 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,6 tahun atau sudah menamatkan kelas 2-3 SMP.

Pada sisi daya beli masyarakat juga memperlihatkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2024, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Kepulauan Selayar meningkat dari 9.446 ribu rupiah per kapita per tahun menjadi 10.235 ribu rupiah per kapita per tahun. Besaran pengeluaran ini tentu menjadi cermin tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.2. Kesejahteraan Masyarakat

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki aktivitas ekonomi yang beraneka ragam dengan sumbangan perekonomian terbesar berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal ini karena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan wilayah kepulauan sehingga sangat menunjang aktivitas perikanan masyarakat serta memiliki lahan yang cukup potensi untuk kegiatan pertanian terutama tanaman perkebunan tahunan. Aktivitas ekonomi ini, dapat tercermin pada angka Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memberikan informasi gambaran kemampuan wilayah untuk menciptakan nilai tambah (*output*) pada suatu waktu tertentu.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kontribusi sejumlah lapangan usaha yang mendukungnya. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Dominasi sektor ini setiap tahunnya terlihat dari kontribusinya yang terbilang cukup besar tiap tahunnya diatas 40 persen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Pada lapangan usaha pertanian khususnya perkebunan, Kabupaten Kepulauan Selayar banyak memproduksi tanaman tahunan, seperti : cengkeh, pala, kelapa (yang sebagian besar kemudian diolah menjadi kopra), jambu mete dan lainnya. Sedangkan pada sektor perikanan, produksi ikan kerapu, lencam, tuna, kuwe, baronang dan banyak ikan lainnya menjadi primadona dan sering menjadi komoditi ekspor antar daerah.

Sementara, aktivitas ekonomi konstruksi di Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi kedua sebagai kontributor perekonomian daerah. Lapangan usaha konstruksi menyumbang rata-rata di atas 20 persen terhadap perekonomian dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Giat pembangunan baik dari pemerintah daerah maupun dari swasta mendorong lapangan usaha ini tetap tumbuh positif selama empat tahun terakhir.

Tabel 3. 2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Distribusi PDRB			
			2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	42,61	43,70	43,89	43,1
B	Pertambangan dan Penggalian	%	0,94	0,95	0,95	0,9
C	Industri Pengolahan	%	2,81	2,78	2,82	2,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	0,09	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,10	0,10	0,09	0,09
F	Konstruksi	%	21,87	21,68	21,69	21,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	7,80	8,02	8,08	8,3
H	Transportasi dan Pergudangan	%	2,08	2,27	2,35	2,34

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Distribusi PDRB			
			2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	0,22	0,23	0,23	0,24
J	Informasi dan Komunikasi	%	2,41	2,24	2,24	2,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	1,30	1,28	1,26	1,27
L	Real Estat	%	1,39	1,29	1,28	1,29
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,02	0,02	0,02	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	7,71	6,93	6,73	7,12
P	Jasa Pendidikan	%	5,82	5,62	5,48	5,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	2,31	2,32	2,31	2,47
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	0,51	0,50	0,50	0,54
Produk Domestik Regional Bruto		%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB atas harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar tiap tahunnya

Commented [D7]: 371

berada diantara 6-8 trilyun selama tahun 2021-2024. Pada tahun 2024, aktivitas ekonomi Kepulauan Selayar menghasilkan PDRB harga berlaku sebesar 8.340,51 triliun rupiah. Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang PDRB terbesar yaitu 3.595,17 triliun rupiah (43,1 persen) diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 1.781,79 triliun rupiah (21,36 persen). Selanjutnya adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 692,55 miliar rupiah (8,3 persen) dan lapangan usaha administrasi pemerintahan sebesar 594,19 miliar rupiah (7,12 persen). Sementara, penyumbang PDRB terkecil adalah lapangan usaha jasa perusahaan yaitu 1,33 miliar rupiah.

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar dalam empat tahun terakhir masih berada di level 3-4 triliunan rupiah. Tercatat di tahun 2021, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 3,766 triliun rupiah, meningkat di tahun 2022 menjadi 3,904 triliun rupiah, meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 4,047 triliun rupiah dan di tahun 2024 4,182 triliun. Jika dibandingkan dengan PDRB harga berlaku, PDRB harga konstan nilainya lebih rendah karena tidak ada pengaruh inflasi didalamnya.

Tabel 3. 3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar Rupiah):				
- Atas Dasar Harga Berlaku	6.835,40	7.480,47	7.986,24	8.340,51
- Atas Dasar Harga Konstan	3.765,56	3.903,80	4.047,38	4.182,33
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,35 poin, yang disebabkan karena beberapa sektor tidak tumbuh secepat yang diharapkan, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sedikit dari tahun sebelumnya. Sementara beberapa sektor lain mengalami perlambatan seperti: Sektor Informasi dan Komunikasi dari 6,45 persen pada tahun 2023 menjadi 4,84 persen pada tahun 2024, begitupun dengan sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Pertanian yang mengalami perlambatan dari 3,26 persen di tahun 2024 menjadi 1,38 persen pada tahun 2024. Namun perlambatan yang paling signifikan terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang melambat menjadi -0,05 persen dari 3,53 persen pada tahun 2023 serta sektor Transportasi dan Pergudangan melambat dari 4,84 persen pada tahun 2023 menjadi 2,41 di tahun 2024. Berikut ini dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor lapangan usaha.

Tabel 3. 4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Pertumbuhan PDRB			
			2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	3,27	2,62	3,26	1,38
B	Pertambangan dan Penggalian	%	6,91	7,66	3,53	-0,05
C	Industri Pengolahan	%	5,11	7,23	3,78	5,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	%	4,17	0,87	7,88	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	0,12	4,11	0,20	0,64
F	Konstruksi	%	4,12	4,56	3,45	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,28	7,86	4,90	5,66

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	Satuan	Pertumbuhan PDRB			
			2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	%	9,98	11,67	4,84	2,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	4,14	13,53	5,11	6,12
J	Informasi dan Komunikasi	%	1,42	1,63	6,45	4,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	%	0,66	0,43	2,86	2,44
L	Real Estat	%	1,25	0,73	4,88	3,74
M,N	Jasa Perusahaan	%	0,32	2,11	2,62	6,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	4,15	-2,22	2,11	8,06
P	Jasa Pendidikan	%	4,74	5,19	4,03	5,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	9,41	8,50	5,34	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	%	5,77	3,12	5,21	11,72
Produk Domestik Regional Bruto		%	4,02	3,67	3,68	3,33

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kinerja kegiatan ekonomi tersebut di atas akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja bidang sosial terutama pada peningkatan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah pendapatan per kapita yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan daya beli masyarakat, perluasan kesempatan kerja, penurunan jumlah penduduk miskin serta perbaikan masa depan perekonomian.

3.2.2.PDRB Per Kapita

Meningkatnya pendapatan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat mendukung maupun yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan. Menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menggunakan indikator pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat yang direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Karena keterbatasan data pendapatan per kapita, umumnya PDRB per kapita digunakan sebagai pendekatan indikator tersebut. Berikut adalah perkembangan PDRB per kapita harga berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Tabel 3. 5 PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024

Periode	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
2021	49,54	27,29
2022	53,76	28,06
2023	56,57	28,48
2024	58,29	29,31

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

PDRB perkapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2021 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai **PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)** seluruh lapangan usaha dari 6.835,40 Milliar Rupiah pada tahun 2021 menjadi 7.480,47 Milliar Rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 7.986,24 Milliar. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 53,76 Juta Rupiah, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah.

Commented [8]: LENGKAPI

3.2.3.Kemiskinan

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan dan penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Percentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2024. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 10,79 persen (14,94 ribu jiwa) lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 12,45 persen (16,93 ribu jiwa). Penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya produksi beberapa sektor unggulan, optimalisasi penyaluran bantuan sosial dan program hibah dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. Secara detail dapat

dilihat pada grafik berikut.

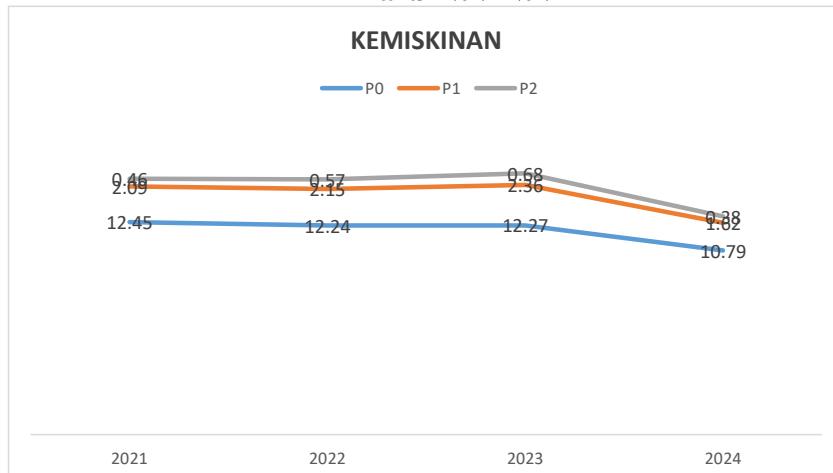
Grafik 3. 2 Persentase Penduduk Miskin Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat Grafik 3.2 di atas, pada tahun 2024 penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 1,95 poin dibandingkan tahun 2023.

Grafik 3. 3 Indikator Kemiskinan Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024



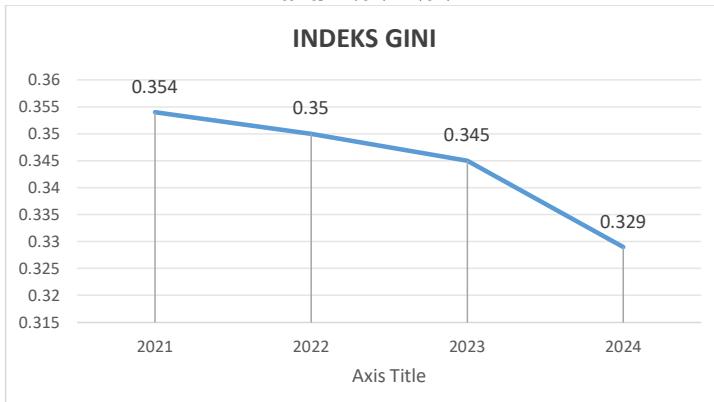
Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada Grafik 3.3 di atas, persentase penduduk miskin (P0) di Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mencapai 10,79 persen dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,62 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,38. Indeks P1 yang menurun di tahun 2024 dari 2,36 menjadi 1,62 Penurunan ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah penduduk miskin yang menurun, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan ikut membaik. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan penduduk miskin meningkat secara menyeluruh. Rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kepulauan Selayar masih jauh dari garis kemiskinan yang ditetapkan BPS yaitu sebesar Rp 453.432 perkapita perbulan pada tahun 2024. Sementara indikator lain seperti P2 juga menunjukkan penurunan di tahun 2024, dimana indeksnya menurun dari 0,68 menjadi 0,38, dimana semakin kecil nilai indeks P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar juga semakin menurun. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan mulai menunjukkan hasil positif pada tahun 2024 setelah periode stagnasi dan perburukan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.

3.2.4.Indeks Gini

Gini Rasio atau indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dan pada tahun 2024 sebesar 0,329 atau turun sebesar 0,016 poin dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3. 4 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

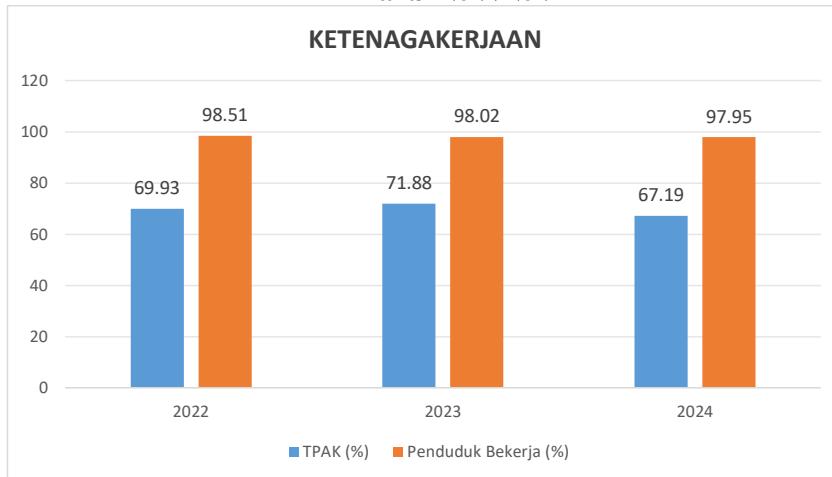
Berdasarkan data pada Grafik 3.4 di atas, penurunan angka Indeks Gini dipengaruhi oleh menurunnya persentase pengeluaran per kapita penduduk pada golongan pengeluaran <300 Ribu Rupiah dari 0,70 persen pada tahun 2022 dan menurun lagi menjadi 0,64 pada tahun 2023, sementara golongan pengeluaran ≥ 300 Ribu Rupiah mengalami peningkatan.

3.3. Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan merupakan data yang penting bagi pengambilan kebijakan Pemerintah, terutama yang menyangkut penciptaan lapangan kerja baru, yang diharapkan membuka kesempatan kerja sehingga mampu mengurangi pengangguran, memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Indikator untuk mengukur kinerja terkait ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Semakin besar TPAK akan semakin baik untuk daerah karena menunjukkan lebih banyak penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sedangkan TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

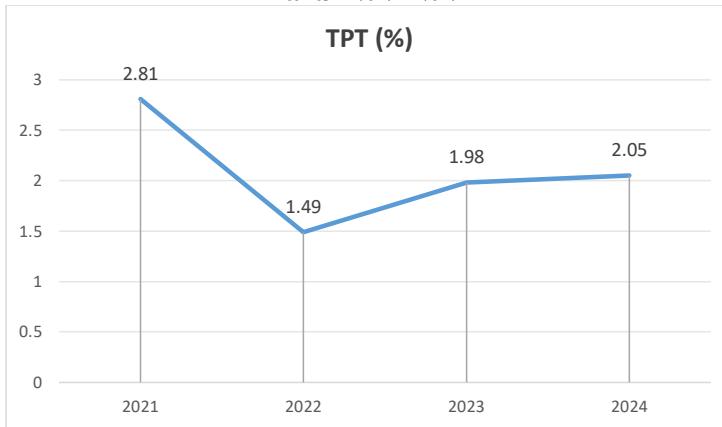
Grafik 3. 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data TPAK Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah 69,93 persen, meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 71,88 persen dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 67,19 persen. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 73.127 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah yang bekerja sebesar 72.036 jiwa atau 98,51 persen. Persentase tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 98,02 persen dari total Angkatan Kerja sebesar 79.058 jiwa, namun dari segi jumlah meningkat menjadi sebanyak 77.490 Jiwa. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 74.971 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah yang bekerja sebesar 73.431 jiwa atau 97,95 persen. Persentase tersebut menurun dari tahun 2023 sebesar 0,07 persen.

Grafik 3. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Melihat Grafik 3.6 di atas, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 yang mencapai 2,05 mengalami peningkatan negatif jika dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar 1,98 persen. Melihat data capaian tahun 2024 tersebut, walau mengalami peningkatan dari sisi jumlah dan persentase, namun angka ini diharapkan kembali dapat terus diturunkan pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV POTENSI DAERAH

4.1. Potensi Daerah

4.1.1. Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting sebagai pendukung bergeraknya roda perekonomian, baik nasional maupun daerah. Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Kepulauan Selayar yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Berdasarkan PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sektor pertanian/perkebunan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar yakni sebesar 16,99 persen, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Commented [9]: LENGKAP

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	16,75	16,23	16,99	19,23
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	2,83	2,64	2,5	2,43
Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB	%	0,96	0,95	0,94	1,00
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	11,86	11,53	12,18	14,41
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	%	1,10	1,11	1,09	1,10

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Selayar, 2025

Sektor pertanian sangat berpengaruh dalam hal penyediaan bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sebagai sumber pendapatan masyarakat. Selain sebagai salah satu dari aspek pendukung perekonomian daerah, sektor pertanian juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi, bahan penelitian dan pendidikan serta bahan promosi adalah informasi luas panen, produksi dan produktivitas.

Berdasarkan uraian diatas, berikut disajikan perkembangan data luas panen, produksi, dan produktivitas dari sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

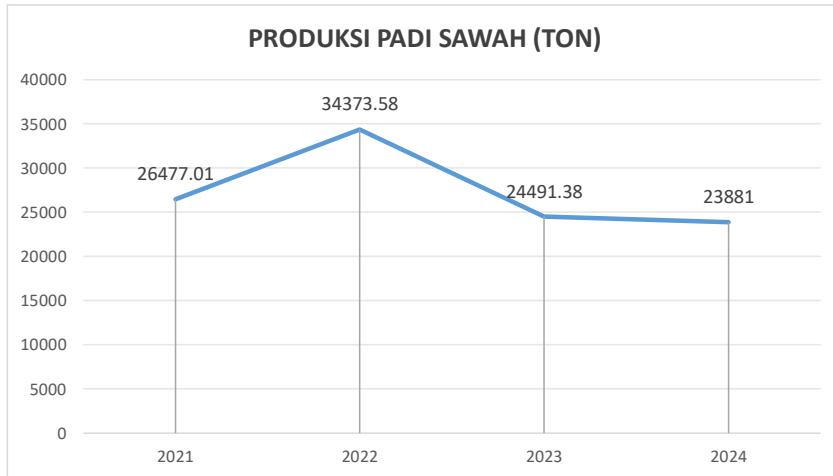
Tabel 4. 2 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Uraian	Satuan	Tanaman Pangan		
		Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung
Luas Panen	Ha	2.002	3,00	1.165,80
Produksi	Ton	23.881	15,00	5.509,35
Produktivitas	Kw/Ha	386,57	50,00	47,2

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa produksi padi tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 23.896 ton. Dari total produksi tersebut, sebesar 15,00 ton merupakan produksi padi ladang.

Grafik 4. 1 Produksi Padi Sawah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan Grafik 4.1 di atas dapat dilihat bahwa produksi padi sawah selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini kurang baik, dan belum sejalan dengan tujuan dari pemerintah kabupaten maupun nasional untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu kendala yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan produksi GKP adalah masih banyaknya petani yang mengandalkan air hujan/tadah hujan sebagai sumber pengairan untuk lahan sawahnya. Dari ±3.000 Ha lahan sawah di Kabupaten Kepulauan Selayar, lebih dari 50 persen pengairan sawah masih mengandalkan pengairan tadah hujan dan sisanya menggunakan irigasi.

Selain tanaman pangan, potensi pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa tanaman sayuran, buah-buahan, biofarma, dan tanaman hias. Informasi data tanaman hortikultura berupa luas panen, produksi, dan produktivitas tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Luas Panen, Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Uraian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Bawang Merah	1,85	6,50	3,51
2.	Cabai Besar	0,01	0,04	4,00
3.	Cabai Keriting	2,25	14,10	6,27
4.	Cabai Rawit	28,56	816,13	28,57
5.	Kacang Panjang	10,71	80,36	7,50
6.	Terung	18,50	270,79	14,64
7.	Tomat	15,98	155,89	9,76
8.	Mentimun	8,34	165,85	19,89
9.	Kangkung	32,14	224,60	6,99
10.	Sawi	3,25	86,07	26,48
11.	Bayam	4,60	88,42	19,22

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.3 di atas, produktivitas dari tanaman sayuran yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 berada dikisaran 2 sampai 26 kuintal/hektar. Jika melihat dari potensi tanaman hortikultura yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar seperti cabai rawit, yang produksinya mencapai 816,13 kuintal dalam setahun dan

merupakan produksi tanaman hortikultura terbesar. Oleh karena itu, sektor industri dapat memanfaatkan cabai rawit untuk diolah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Selain tanaman sayuran, potensi pertanian Kabupaten Kepulauan Selayar berasal dari buah-buahan. Data produksi buah-buahan empat tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Produksi Buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

No.	Jenis Tanaman	Produksi Pertahun (Kuintal)			
		2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	21,00	64,50	116,50	105,00
2	Durian	246,00	99,00	8.523,00	345,00
3	Jambu Biji	110,00	64,40	86,50	66,70
4	Jambu Air	25,50	31,10	125,90	49,60
5	Jeruk Siam/ Keprok	34.101,60	17.051,20	3.455,00	35.419,64
6	Jeruk Pamelو	816,00	686,00	1,00	8,70
7	Mangga	8.577,50	7.765,00	4.478,48	14.446,10
8	Nangka	398,00	521,00	26,16	190,30
9	Nenas	11,70	14,00	21,51	7,16
10	Pepaya	1.512,07	1.780,91	1.179,63	1.519,32
11	Pisang	6.934,80	8.629,00	3.785,49	12.786,98
12	Rambutan	12,00	4,00	1.450,00	348,95
13	Sirsak	152,50	122,60	243,14	308,79
14	Sukun	707,9	1.624,60	1.702,50	3.090,50
15	Melinjo	290,00	333,78	455,94	273,13

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa produksi terbesar dari tanaman buah-buahan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah jeruk siam, mangga, dan pisang. Produksi jeruk siam dengan varietas khas Selayar, menunjukkan peningkatan produksi dari tahun 2023. Komoditas jeruk siam mengalami lonjakan produksi yang sangat besar pada tahun 2024.

Selain sektor pertanian, potensi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar juga berasal dari sektor perkebunan. Beberapa komoditas perkebunan yang dihasilkan di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki prospek yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar. Data produksi komoditas tanaman perkebunan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Uraian	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1.	Kelapa	19.765,00	26.829,46	13,52
2.	Kopi	7,50	4,58	4,16
3.	Kakao	553,00	184,90	3,44
4.	Vanili	113,00	70,02	6,20
5.	Jambu Mede	3.801,00	2.050,35	6,33
6.	Cengkeh	1.437,02	495,64	3,45
7.	Pala	2.656,56	404,18	1,53
8.	Kemiri	1.986,00	2.756,5	13,88
9.	Kenari	326,00	273,91	8,40
10.	Lada	81,00	20,99s	2,74

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat kita lihat potensi perkebunan terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar adalah komoditas kelapa. Tercatat produksi tahun 2024 mencapai 26 ribu ton lebih dengan produktivitas sebesar 13,52 kw/Ha. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencari sektor industri yang dapat dilibatkan untuk mengolah hasil tersebut sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Salah satu industri yang dapat dikembangkan adalah pengolahan kelapa terpadu, karena saat ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar aktif mengolah hasil kelapa menjadi komoditi kopra sementara bagian lain dari kelapa tersebut kurang termanfaatkan.

4.1.2. Perikanan

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki panjang garis pantai sekitar 670 km dengan jumlah pulau kecil sebanyak 130 pulau dan luas laut seluas 9.146,66 km² sehingga sangat potensial untuk kegiatan penangkapan ikan dan budidaya. Produksi perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya laut dapat dikatakan cukup tinggi. Produksi perikanan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4. 6 Produksi Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.883,8	21.223,40	24.962,90	25.610
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	522,8	543,52	469,46	507,97

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Data pada Tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan produksi sektor perikanan tangkap pada tahun 2024 menjadi sebesar 25.610 ton dari 24.962,90 pada tahun 2023 dan yang tertinggi sebesar 6.010 ton dari produksi tersebut berasal dari Kecamatan Takabonerate. Selanjutnya secara berturut-turut produksi perikanan tangkap setiap kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Bontosikuyu 3.854 ton, Bontoharu 3.830 ton, Pasimarannu 2.761 ton, Pasilambena 2.160 ton, Pasimasunggu 2.087 ton, Bontomatene 1.848 ton, Buki 1.159 ton, Pasimasunggu Timur 928 ton, Bontomanai 761 ton dan Kecamatan Benteng 212 ton.

Sementara untuk produksi perikanan budidaya sebesar 507,97 ton pada tahun 2024 yang berasal dari Kecamatan Pasimarannu, sebesar 77,51 ton Kecamatan Bontoharu, Pasimasunggu Timur 35,01 ton, Bontosikuyu 22,42 ton, Takabonerate 15,30 ton, Pasilambena 9,76 ton, Pasimasunggu 8,30 ton serta Bontomanai sebesar 0,12 ton. Produksi tersebut didukung oleh rumah tangga perikanan budidaya dengan jumlah sebanyak 591 rumah tangga pada tahun 2024 yang tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun 3 kecamatan yang tidak memiliki rumah tangga perikanan budidaya adalah Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Buki.

Untuk meningkatkan produksi perikanan, harus didukung dari beberapa program pembangunan, yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan dengan fokus pengembangan komoditas unggulan melalui kegiatan-kegiatan yang bermuara pada pengembangan teknologi budidaya dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan, serta meningkatkan pembinaan kepada nelayan. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan

infrastruktur serta peningkatan kapasitas nelayan dan pembangunan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

4.1.3. Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berkembang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah potensi yang dimiliki, seperti: wilayah yang cukup luas, iklim yang mendukung serta kemudahan dalam memperoleh pakan untuk ternak. Namun demikian pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pada sektor peternakan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu informasi yang sangat berguna untuk pengambilan kebijakan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Selayar adalah populasi hewan ternak dan populasi unggas.

Tabel 4. 7 Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Hewan (Ekor)				
	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
Pasimarannu	181	107	21	12.394	-
Pasilambena	881	-	104	2.234	-
Pasimasunggu	1.534	671	78	473	-
Takabonerate	56	142	24	279	-
Pasimasunggu Timur	453	1.407	42	428	-
Bontosikuyu	3.298	77	112	631	26
Bontoharu	1.415	26	34	950	-
Benteng	796	-	-	362	-
Bontomanai	1.484	64	76	755	71
Bontomatene	2.250	142	83	4.268	-
Buki	1.210	95	45	584	27
Kep. Selayar	13.558	2.731	619	23.358	124

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Tabel 4. 8 Populasi Unggas Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Unggas (Ekor)			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Pasimarannu	4.702	-	-	710
Pasilambena	2.623	-	-	175
Pasimasunggu	1.907	-	-	553
Takabonerate	1.531	-	730	44
Pasimasunggu Timur	8.225	-	-	443

Kecamatan	Populasi Unggas (Ekor)			
	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
Bontosikuyu	6.326	2.139	-	1.174
Bontoharu	5.663	4.604	1.059	224
Benteng	2.593	1.460	1.013	151
Bontomanai	4.822	2.192	1.698	333
Bontomatene	7.522	934	986	107
Buki	2.608	815	-	249
Kep. Selayar	48.522	12.144	5.486	4.163

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kebutuhan akan hewan ternak di Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi pendorong meningkatnya aktifitas di sektor peternakan. Pada tahun 2024 populasi sapi potong mencapai 13.558 ekor dengan Kecamatan Bontosikuyu sebagai kecamatan dengan populasi sapi potong terbesar yaitu 3.298 ekor. Untuk populasi kerbau mencapai 2.731 ekor dengan Kecamatan Pasimassunggu Timur sebagai kecamatan dengan populasi kerbau terbesar yaitu 1.407 ekor. Untuk populasi kuda mencapai 619 ekor dengan Kecamatan Bontosikuyu sebagai kecamatan dengan populasi kuda terbesar yaitu 112 ekor. Untuk populasi kambing mencapai 23.358 ekor dengan Kecamatan Pasimaranu sebagai kecamatan dengan populasi kambing terbesar yaitu 12.394 ekor dan untuk populasi domba hanya tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bontomanai sebanyak 71 ekor, Bontosikuyu sebanyak 26 ekor dan Buki 27 ekor.

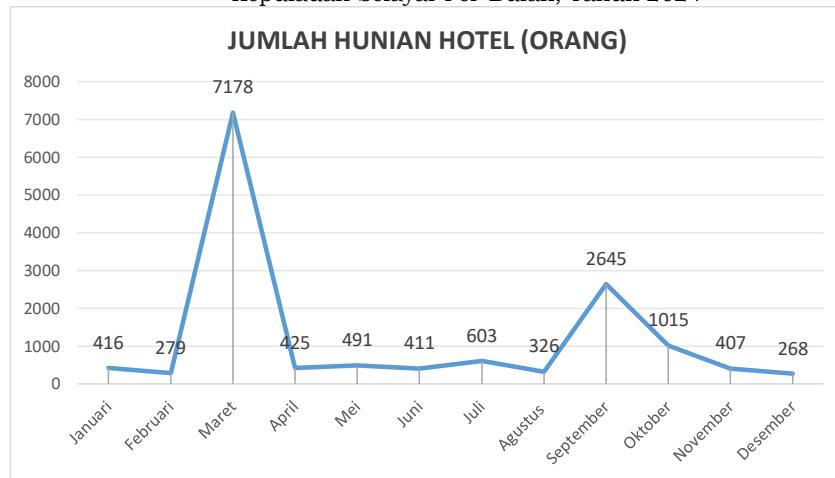
Sektor ternak unggas tahun 2024 terdata, populasi ayam kampung sebesar 48.522 ekor dengan Kecamatan Pasimasunggu Timur sebagai kecamatan dengan populasi ayam kampung terbesar yakni sebanyak 8.225 ekor. Untuk populasi ayam petelur mencapai 12.144 ekor dengan Kecamatan Bontoharu sebagai kecamatan dengan populasi ayam petelur terbesar yaitu 4.604 ekor. Untuk populasi ayam pedaging mencapai 5.486 ekor dengan Kecamatan Bontomanai sebagai kecamatan dengan populasi ayam pedaging terbesar yaitu 1.698 ekor dan untuk populasi itik/itik manila mencapai 4.163 ekor dengan Kecamatan Bontosikuyu sebagai kecamatan dengan populasi itik/itik manila terbesar yaitu 1.174 ekor.

4.1.4. Pariwisata

Sektor pariwisata memiliki peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbagai upaya yang dilakukan guna mengembangkan kepariwisataan di kabupaten diantaranya adalah melalui promosi wisata secara teratur baik di dalam maupun di luar daerah, penyediaan fasilitas akomodasi dan prasarana lainnya dan peningkatan mutu pelayanan, sehingga diharapkan arus wisatawan semakin besar yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Berdasarkan data jumlah hunian kamar hotel tahun 2024, terdapat sebanyak 14.464 wisatawan yang menginap di hotel dengan rincian 394 wisatawan asing dan 14.070 wisatawan lokal dengan rata-rata lama menginap selama 1 sampai 3 malam. Selain itu, terdapat sebanyak 165 rumah makan/restoran yang tercatat pada tahun 2024. Adapun jumlah tamu hotel dan akomodasi lainnya per bulan dapat dilihat pada Grafik 4.2 berikut:

Grafik 4. 2 Banyaknya Tamu Hotel/ Akomodasi/ Penginapan Kabupaten Kepulauan Selayar Per-Bulan, Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

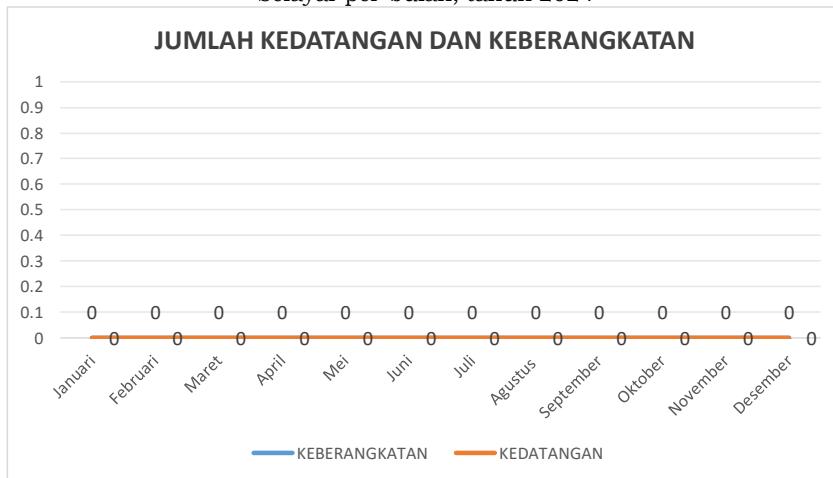
Berdasarkan data di atas, jumlah tamu hotel/ akomodasi/ penginapan tahun 2024 sebanyak 14.464 orang dengan puncak tamu yang menginap pada seluruh hotel dan akomodasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024 adalah pada Bulan Maret dengan jumlah hunian sebanyak 7.178

orang, sedangkan jumlah tamu paling sedikit tercatat pada awal tahun yakni bulan Januari dengan angka hunian sebanyak 268 pengunjung.

Salah satu indikator produktivitas dari hotel dan akomodasi lainnya adalah Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel. Dengan mengetahui tingkat penghunian kamar hotel akan tergambar banyaknya tamu yang datang menginap serta lamanya tamu tersebut tinggal disuatu hotel dan akomodasi lainnya. TPK pada tahun 2024 sebesar 2,84 persen untuk hotel berbintang, sedangkan hotel nonbintang sebesar 3,79 persen. Ini berarti usaha sektor hotel dan akomodasi lainnya belum memberikan tanda-tanda keuntungan/profit, dimana jumlah kunjungan wisatawan yang datang dan menginap masih sedikit karena nilai TPK masih dibawah 20 persen.

Melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar juga dapat dilihat dari perkembangan sektor transportasi. Berikut adalah informasi perkembangan jumlah penumpang yang datang dan berangkat per bulan menggunakan jasa pesawat terbang di Bandar Udara H. Aroeppala yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024:

Grafik 4. 3 Jumlah Penumpang Melalui Bandara Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar per-bulan, tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Selain bandar udara, akses dari dan ke Kepulauan Selayar juga dapat melalui pelabuhan penyeberangan yang terletak di Selatan Pulau Selayar, yaitu Pelabuhan Pamatata. Kegiatan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar juga bergantung pada aktivitas penyeberangan ini karena di pelabuhan tersebut terdapat kapal fery yang melayani rute Pamatata (Selayar) – Bira (Bulukumba).

Potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh banyaknya destinasi wisata yang tersebar hampir di semua kecamatan. Salah satu obyek wisata yang mendunia dan menjadi primadona di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Taman Nasional Takabonerate yang berada di Kecamatan Takabonerate. Berikut adalah informasi potensi lokasi ekowisata yang ada di Taman Nasional Takabonerate.

Tabel 4. 9 Lokasi Ekowisata di Taman Nasional Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Nama Lokasi		Luas (m ²)	Aktivitas Yang Dapat Dilakukan
1	Tinabo Besar	Tinabo Besar Barat Utara	3.588	Berenang, Rekreasi Pantai, Berjemur, Olahraga Air, Baby Shark, Berkemah
		Tinabo Besar Barat Selatan	4.592	
		Tinabo Besar Timur Selatan	6.525	
		Tinabo Besar Timur Utara	4.634	
2	Tarupa Kecil	Tarupa Kecil Barat	11.628	Berenang, Rekreasi Pantai, Berjemur, Olahraga Air
		Tarupa Kecil Timur	12.336	
3	Tinabo	Bunging Tinabo	9.280	Berenang, Rekreasi Pantai, Berjemur, Olahraga Air
4	Belang-belang	Belang-belang Barat	8.310	Berenang, Rekreasi Pantai, Berjemur, Olahraga Air
		Belang-belang Timur	8.250	
5	Jinato	Lidah Jinato	10.332	
6	Lantigiang	Lantigiang	12.130	

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Taman Nasional Takabonerate merupakan taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Luas atol di kawasan ini diperkirakan mencapai 220.000 hektar dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Karena topografi kawasan ini yang unik serta menarik dimana atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau karang kosong dengan rataan terumbu karang yang

luas dan tenggelam dimana terdapat banyak kolam kecil yang dalam dan dikelilingi oleh terumbu karang menjadikan kawasan ini banyak menarik minat para pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Serangkaian *event* menarik dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya, seperti kegiatan Festival Pesona Takabonerate. *Event* ini selain merupakan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan juga dapat menjadi motor penggerak arus wisatawan agar berkunjung ke Taman Nasional Takabonerate. Jumlah pengunjung Taman Nasional Takabonerate pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10 Jumlah Pengunjung di Taman Nasional Takabonerate Tahun 2024

Bulan	Wisatawan Asing (Orang)	Wisatawan Domestik (Orang)	Jumlah
Januari	-	23	24
Februari	1	123	124
Maret	-	37	37
April	93	217	310
Mei	-	320	320
Juni	199	492	691
Juli	-	69	69
Agustus	-	258	258
September	-	97	97
Oktober	146	998	1.144
November	-	-	0
Desember	-	-	0
Total	439	2.634	3.073

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

4.1.5. Industri dan Perdagangan

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar, sektor industri perlu lebih dikembangkan secara terpadu dan seimbang, karena dengan berkembangnya sektor ini diharapkan pula dapat membantu memecahkan masalah pengangguran

dengan menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat mempercepat proses pembangunan wilayah.

Kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 hanya sebesar 2,93 persen. Kondisi tersebut menurun sebesar 0,11 persen dari tahun sebelumnya, sebaliknya bahan baku untuk industri cukup melimpah dari hasil pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, pelatihan maupun *event* kreativitas harus banyak diselenggarakan oleh pemerintah agar industri pengolahan dapat berkembang dan menghasilkan produk unggulan daerah yang bisa dipasarkan di luar daerah dan meningkatkan penghasilan rumah tangga. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut.

Tabel 4. 11 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Milliar Rp.	191,83	207,73	224,94	244,51
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	2,81	2,78	2,82	2,93

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih di dominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga dan sebagian besar bergerak pada sub kategori pengolahan makanan dan minuman. Salah satu jenis industri yang tidak bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman, namun banyak dikerjakan oleh masayarakat Kabupaten Kepulauan Selayar adalah pengolahan kelapa menjadi komoditi kopra. Hal ini disebabkan karena produksi kelapa yang melimpah setiap tahunnya, dan proses pengerjaannya tidak membutuhkan modal besar. Sebagaimana data yang disajikan sebelumnya, bahwa produksi kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 26.829,46 ton dan merupakan produksi terbesar untuk jenis tanaman perkebunan.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 8,30 persen dengan besar PDRB atas dasar harga berlaku yaitu 692,55 Milliar Rupiah pada tahun 2024, atau kontributor

terbesar ketiga setelah pertanian, dan kontruksi. Daya beli masyarakat yang meningkat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor perdagangan. Data PDRB sektor perdagangan dan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4. 12 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
PDRB Sektor Perdagangan (ADHB)	Milliar Rp.	532,85	599,82	645,43	692,55
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	7,80	8,02	8,08	8,30

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih didominasi oleh pedagang kecil dan pedagang menengah, sedangkan pedagang besar masih sangat minim. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjual kembali dalam jumlah yang besar. Pedagang menengah membeli barang dalam jumlah besar dan menjual kembali kepada pedagang kecil dalam jumlah sedang atau kecil. Pedagang kecil membeli barang dalam jumlah sedang dan menjual kembali kepada konsumen akhir.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan meningkatkan peran sektor industri dan perdagangan terhadap pembangunan ekonomi diperlukan langkah-langkah strategis, seperti pembangunan pusat distribusi logistik untuk memaksimalkan potensi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim. Selain itu diperlukan pula upaya-upaya konkret melalui bantuan modal usaha untuk pedagang kecil dan sarana prasarana industri yang dapat mendorong pelaku industri kecil atau rumah tangga untuk meningkatkan proses produksinya.

4.2. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur dan peningkatan jumlah penduduk memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek dapat menciptakan lapangan kerja sektor kontruksi dan dalam jangka menengah atau panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas

sektor-sektor unggulan suatu daerah. Pengembangan infrastruktur yang terarah dan terencana akan mendorong peningkatan pelayanan terhadap pengembangan daerah sehingga tercipta perekonomian wilayah yang produktif. Sebagai kabupaten yang memiliki visi mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera tentu Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki fokus untuk mensejahterakan masyarakatnya baik dari sisi pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi pada berbagai sektor. Keterpenuhan berbagai sarana dan prasarana pendukung tentu menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi.

4.2.1. Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku atau pembentukan pribadi yang terarah pada diri peserta didik dalam usaha mendewasakan peserta didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, menjadikan pendidikan harus mendapatkan perhatian besar. Keberadaan fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah. Berikut merupakan data jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 4. 13 Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	PAUD		Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama		Sekolah Menengah Atas		
	TK	RA	SD	MI	SMP	MTS	SMA	SMK	MA
Pasimarannu	10	-	10	-	3	-	1	-	-
Pasilambena	6	-	10	-	5	-	-	1	-
Pasimasunggu	10	-	10	-	5	-	-	1	-
Takabonerate	9	-	13	-	7	-	1	-	-
Pasimasunggu Timur	9	-	9	-	4	1	1	-	-
Bontosikuyu	20	6	20	2	8	1	1	1	-
Bontoharu	12	5	13	3	4	2	2	-	-
Benteng	12	3	10	2	5	2	2	3	1
Bontomanai	20	1	19	3	7	3	1	1	-
Bontomatene	16	4	17	-	6	-	1	1	-
Buki	15	2	10	4	3	2	1	-	-
Jumlah	139	21	142	14	57	11	11	8	1

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kualitas pendidikan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh rasio guru terhadap murid yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar pada setiap jenjang Pendidikan. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1:20.

Tabel 4. 14 Jumlah Guru dan Murid Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023/2024

Kecamatan	PAUD		Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama		Sekolah Menengah Atas	
	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
Pasimaranu	26	322	127	1.119	63	465	30	393
Pasilambena	25	195	108	956	84	324	15	89
Pasimasunggu	29	284	132	986	65	423	25	237
Takabonerate	37	444	151	1.577	100	485	28	179
Pasimasunggu Timur	29	184	100	733	68	367	31	405
Bontosikuyu	84	534	259	1.475	123	657	49	443
Bontoharu	56	343	201	1.240	117	583	38	327
Benteng	112	1.539	232	2.820	171	1.567	269	2.864
Bontomanai	70	346	243	1.211	121	534	41	227
Bontomatene	80	362	234	1.056	113	587	62	588
Buki	48	225	129	621	99	269	22	196
Jumlah	596	4.778	1.916	13.794	1.124	6.261	610	5.984

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025 diolah

Berdasarkan data Tabel 4.14 di atas, rasio guru terhadap murid baik pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024 sudah memenuhi standar sesuai peraturan pemerintah yang ditetapkan, yaitu rata-rata rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan PAUD adalah 596:4.778 atau 1 orang guru mengajar 8 murid (1:7), jenjang SD adalah 1.916:13.794 atau 1 orang guru mengajar 7 murid (1:7) dan jenjang

pendidikan SMP adalah 1.124:6.261 atau 1 orang guru mengajar 6 murid (1:6). Pemenuhan standar rasio ini untuk menjaga kualitas pengajaran dan pengawasan guru terhadap murid menjadi lebih optimal.

4.2.2. Sarana Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta berperan penting terhadap penanggulangan kemiskinan. Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mendukung hal tersebut maka, keberadaan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu untuk diperhatikan. Jumlah fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.

Tabel 4. 15 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan		
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu
Pasimarannu	-	1	7
Pasilambena	-	1	6
Pasimasunggu	-	1	6
Takabonerate	-	1	7
Pasimasunggu Timur	1	1	5
Bontosikuyu	-	2	11
Bontoharu	1	1	7
Benteng	-	1	-
Bontomanai	-	2	8
Bontomatene	-	2	8
Buki	-	1	5
Jumlah	2	14	70

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025 diolah

Keberadaan sarana kesehatan, seperti : rumah sakit, puskesmas, dan pustu memang sangat dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang. Kebutuhan tersebut sejalan dengan kebutuhan terhadap tenaga medis yang akan bertugas pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani

masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikut data jumlah tenaga medis yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024.

Tabel 4. 16 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Kesehatan			
	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Pasimarannu	22	34	5	2
Pasilambena	30	39	4	1
Pasimasunggu	25	35	5	-
Takabonerate	23	44	4	1
Pasimasunggu Timur	36	32	5	2
Bontosikuyu	48	66	7	3
Bontoharu	235	172	21	13
Benteng	38	46	6	4
Bontomanai	62	82	3	4
Bontomatene	52	69	8	5
Buki	25	56	3	8
Jumlah	596	675	71	41

Sumber Data: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Meskipun merupakan wilayah kepulauan yang memerlukan upaya tambahan untuk mengakses setiap wilayah, namun jumlah tenaga medis dapat tersedia di seluruh kecamatan Kepulauan Selayar. Dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, pada seluruh kecamatan jumlah tenaga ahli gizi harus lebih ditingkatkan.

4.2.3. Sarana Transportasi

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sarana dan prasarana dimaksud adalah jalan, terminal, pelabuhan maupun bandar udara. Berikut disajikan jumlah pelabuhan laut/ bandara/ terminal bis di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024.

Tabel 4. 17 Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Kecamatan	Fasilitas Perhubungan			
	Pelabuhan Laut	Bandar Udara	Terminal Bis	Jumlah
Pasimaranu	2	-	-	2
Pasilambena	2	-	-	2
Pasimasunggu	1	-	-	1
Takabonerate	3	-	-	3
Pasimasunggu Timur	1	-	-	1
Bontosikuyu	1	-	-	1
Bontoharu	-	1	-	1
Benteng	2	-	1	3
Bontomanai	-	-	-	-
Bontomatene	2	-	-	2
Buki	-	-	-	-
Total	14	1	1	16

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025 diolah

Selain sarana prasarana sebagaimana disajikan pada Tabel 4.17 di atas, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Kepulauan Selayar harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Tabel 4. 18 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Jenis Permukaan					
Aspal	Km	485,74	490,90	474,67	487,74
Kerikil	Km	167,57	163,46	151,19	138,14
Tanah	Km	206,25	205,20	198,92	198,92
Lainnya	Km	8,04	8,04	-	-
Total	Km	867,6	867,6	824,78	824,8
Kondisi Jalan					
Baik	Km	311,70	329,65	318,96	312,90
Sedang	Km	179,45	175,62	153,32	137,30

Uraian	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Rusak	Km	128,48	103,61	93,80	46,35
Rusak Berat	Km	247,97	258,72	258,71	328,25
Total		867,60	867,60	824,80	824,80

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

Kebutuhan akan sarana jalan, tidak cukup hanya memperhatikan panjang jalan melainkan harus dilihat dari kualitas atau kondisinya. Pada tahun 2024 total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 824,8 km, sepanjang 312,90 km (37,94 Persen) dengan kondisi jalan yang baik dan 137,30 km (16,65 persen) dalam kondisi sedang sementara sisanya dalam keadaan rusak sepanjang 46,35 km (5,62 persen) dan rusak berat sepanjang 328,25 km (39,8 persen). Selain itu terdapat jalan sepanjang 105,4 km merupakan jalan nasional yang kewenangannya pada Pemerintah Pusat, dan sepanjang 44,1 km merupakan jalan provinsi yang kewenangannya pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga total panjang jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 974,3 km.

BAB V

PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH

5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Dengan demikian, ekonomi suatu daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2021-2024, mengalami perlambatan dari 4,02 persen pada tahun 2021 menjadi 3,67 persen pada tahun 2022, tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 0,01 poin menjadi 3,68 persen namun pada tahun 2024 mengalami perlambatan 0,35 poin menjadi 3,33 . Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten lain dalam wilayah setara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada posisi kedelapan dan merupakan yang terendah, sedangkan Kabupaten Bone merupakan yang tertinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,55 persen, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024

No	Kab. / Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi			
			2021	2022	2023	2024
1	Bone	%	5,53	5,23	3,77	5,55
2	Pare Pare	%	4,41	5,93	3,88	5,09
3	Pangkep	%	3,46	4,93	4,75	5,00
4	Bulukumba	%	4,76	3,81	4,11	4,60
5	Toraja Utara	%	4,05	5,27	3,94	4,49
6	Palopo	%	5,41	5,83	4,34	4,40
7	Takalar	%	5,05	4,64	3,86	4,34

No	Kab./ Kota	Satuan	Pertumbuhan Ekonomi			
			2021	2022	2023	2024
8	Kepulauan Selayar	%	4,02	3,67	3,68	3,33
	Sulawesi Selatan	%	4,65	5,09	4,51	5,02
	Nasional	%	3,70	5,31	5,04	5,03

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Memperhatikan data di atas, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang masing-masing sebesar 4,51 persen dan 5,04 persen. begitupun jika dilihat pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 5,02 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,03 persen untuk nasional. Hal tersebut disebabkan beberapa sektor lapangan usaha tidak tumbuh secepat yang diharapkan, seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kurang sebesar 1,88 poin dari tahun sebelumnya. Sektor konstruksi kurang sebesar 1,34 poin dari tahun 2023 dan sektor perdagangan besar dan eceran hanya tumbuh sebesar 0,76 poin. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga laju pertumbuhannya hanya sebesar 0,14 poin dari 5,10 persen pada tahun 2023 menjadi 5,24 persen pada tahun 2024. Jika sektor-sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB ini tidak tumbuh sesuai harapan, maka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan terpengaruh.

5.2. PDRB Perkapita

Pendapatan per kapita adalah total PDRB dibagi dengan total penduduk pada suatu daerah untuk tahun yang sama. Nilai PDRB per kapita (total nilai PDRB dibagi jumlah penduduk) sebagai angka yang menunjukkan Pendapatan per kapita adalah salah satu angka yang dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan dari aspek perekonomian suatu wilayah. Namun penggunaan indikator pendapatan per kapita tentu belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesejahteraan penduduk, karena tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan

tertentu, namun secara luas membandingkan antara besar pendapatan total dengan total jumlah penduduk. Lebih lanjut indikasi pendapatan per kapita harus disandingkan dengan keadaan inflasi, Indeks Gini dan beberapa indikasi kesenjangan pendapatan maupun pengeluaran termasuk perkembangan harga-harga berbagai jenis barang kebutuhan pokok.

PDRB per kapita di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2022 terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai PDRB ADHB seluruh lapangan usaha dari 7.480,47 Milliar Rupiah pada tahun 2022 menjadi 7.986,24 Milliar Rupiah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 8.340,51 Milliar Rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 49,54 Juta Rupiah, meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 56,57 Juta Rupiah dan pada tahun 2024 sebesar 58,45 Juta Rupiah.

Tabel 5. 2 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB antara Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024

No	Kab./ Kota	Satuan	PDRB Per Kapita ADHB			
			2021	2022	2023	2024
1	Pare Pare	Juta Rp	51,18	56,16	58,78	61,97
2	Bone	Juta Rp	48,80	53,67	57,02	60,25
3	Luwu	Juta Rp	48,55	54,03	57,36	59,72
4	Sidrap	Juta Rp	47,19	51,00	55,51	59,30
5	Sinjai	Juta Rp	47,05	51,29	55,29	59,07
6	Kepulauan Selayar	Juta Rp	49,54	53,76	56,57	58,45
7	Palopo	Juta Rp	46,52	51,18	54,47	56,65
8	Luwu Utara	Juta Rp	44,33	48,96	53,45	47,73
	Sulawesi Selatan	Juta Rp	59,66	65,59	69,70	73,57
	Nasional	Juta Rp	62,26	71,03	74,96	

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 berada pada urutan keenam dari delapan kabupaten/kota setara dan yang terendah adalah Kabupaten Luwu Utara dengan PDRB per kapita sebesar 47,73 Juta Rupiah. PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 73,57 Juta Rupiah dan nasional sebesar 78,6 Juta Rupiah.

5.3. Indeks Gini

Gini ratio atau koefisien gini merupakan metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Jika koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Jika mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), indeks ketimpangan pengeluaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang digambarkan dengan nilai Indeks Gini memperlihatkan angka yang semakin baik selama 4 (empat) tahun terakhir. Pada tahun 2021 Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 0,354 dan mengalami penurunan positif menjadi sebesar 0,350 tahun 2022, tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,345, beritupun pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,329

Tabel 5. 3 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024

No	Kab./ Kota	Gini Ratio			
		2021	2022	2023	2024
1	Bantaeng	0,332	0,320	0,336	0,249
2	Luwu Utara	0,341	0,349	0,342	0,272
3	Sinjai	0,384	0,357	0,345	0,287
4	Pinrang	0,367	0,363	0,340	0,299
5	Jeneponto	0,353	0,338	0,340	0,304
6	Luwu	0,375	0,364	0,341	0,319
7	Sidrap	0,358	0,354	0,345	0,319
8	Kepulauan Selayar	0,354	0,350	0,345	0,329
	Sulawesi Selatan	0,377	0,338	0,377	0,363
	Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Angka Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan kedelapan jika dibandingkan dengan kabupaten lain dalam wilayah setara. Kabupaten dengan Indeks Gini terendah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng yakni sebesar 0,249. Sedangkan kabupaten dengan Indeks Gini tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nilai koefisien gini yakni sebesar 0,329. Jika dibandingkan dengan Indeks

Gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,363 dan nasional sebesar 0,381, Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dari keduanya.

5.4. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan data antara tahun 2023 dan tahun 2024, persentase penduduk miskin Kepulauan Selayar mengalami penurunan sebesar 1,48 poin dari 12,27 persen menjadi 10,79 persen. Berikut disajikan data persentase penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2023.

Tabel 5. 4 Perbandingan Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2024

No	Kab./ Kota	Persentase Penduduk Miskin			
		2021	2022	2023	2024
1.	Pangkep	14,28	13,92	13,4	12,41
2.	Jeneponto	14,28	13,73	13,06	11,82
3.	Luwu	12,53	12,49	12,71	11,70
4.	Enrekang	12,47	12,39	12,69	11,25
5.	Luwu Utara	13,59	13,22	12,66	11,24
6.	Kepulauan Selayar	12,45	12,24	12,27	10,79
7.	Toraja Utara	11,99	11,65	12,12	10,73
8.	Tana Toraja	12,27	12,18	12,48	10,7
	Sulawesi Selatan	8,78	8,63	8,70	8,06
	Nasional	9,71	9,54	9,36	9,03

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan yang terendah ketiga jika dibandingkan dengan tujuh kabupaten lain dalam wilayah setara, dimana yang terendah adalah Kabupaten Tana Toraja sebesar 10,7 persen dan yang tertinggi adalah Kabupaten Pangkep sebesar 12,41 persen. Jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, maka angka kemiskinan Kepulauan Selayar masih diatas angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,06 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 736,48 ribu jiwa (terjadi penurunan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,70 persen atau 788,85 ribu jiwa) dan angka kemiskinan nasional sebesar 9,03 persen.

5.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam tiga tahun terakhir terus meningkat, dimana pada tahun 2021 sebesar 67,76, pada tahun 2022 menjadi 68,35 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 69,20 serta pada tahun 2024 menjadi 70,03. Dengan IPM tersebut, capaian pembangunan manusia Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kategori “tinggi” (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$). Terdapat 19 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang capaian IPM-nya masuk dalam kategori “tinggi” (capaian $70 \leq \text{IPM} < 80$). Sedangkan Kota Makassar merupakan satu-satunya daerah yang status IPM-nya masuk kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$).

Tabel 5. 5 Perbandingan IPM Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kabupaten dalam Wilayah Setara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2021-2024

No	Kab./ Kota	IPM				Laju IPM (%) 2023-2024
		2021	2022	2023	2024	
1	Bantaeng	68,99	69,69	70,57	71,48	1,29
2	Soppeng	68,99	69,70	70,58	71,39	1,15
3	Pangkajene dan Kepulauan	69,21	69,79	70,59	71,22	0,89
4	Kepulauan Selayar	67,76	68,35	69,20	70,03	1,20
5	Sinjai	67,75	68,33	68,92	69,52	0,87
6	Takalar	67,72	68,31	68,90	69,47	0,83
7	Bone	66,4	67,01	67,81	68,36	0,81
8	Jeneponto	64,56	65,13	65,90	66,38	0,73
	Sulawesi Selatan	72,24	72,82	73,46	74,05	0,80
	Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	0,85

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2025

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sampai dengan 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Dimana pada tahun 2024 capaian IPM Sulawesi Selatan sebesar 74,05 dan capaian nasional sebesar 75,02. Jika dibandingkan dengan delapan kabupaten/ kota dalam wilayah setara di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IPM Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada urutan ke empat.

Untuk melihat tingkat pembangunan manusia pada suatu wilayah adalah dengan melihat angka pertumbuhan IPM. Jika dibandingkan delapan kabupaten/ kota dalam wilayah setara selama periode 2021-2024, pertumbuhan IPM tertinggi adalah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Soppeng dengan pertumbuhan sebesar 1,29 persen dan 1,15 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 0,73 persen. Untuk Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami pertumbuhan sebesar 1,20 persen, tertinggi keempat dari delapan kabupaten/kota dalam wilayah setara di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI **PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

6.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar, menetapkan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 **“Kepulauan Selayar Mapan, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik Kepulauan Selayar yang secara geografis didominasi oleh wilayah laut. Disamping itu, Visi tersebut diatas memberikan gambaran tentang adanya keinginan yang kuat baik secara politik maupun secara historis dari pemerintah dan masyarakat Kepulauan Selayar untuk menjadikan laut sebagai titik tumpu perekonomian daerah ke depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 20 tahun, dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang Tangguh dan berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah berbasis potensi kemaritiman dan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pengembangan tata Kelola pemerintahan yang *good governance*;
4. Mewujudkan kemantapan ekonomi daerah dan kehidupan masyarakat yang aman dan berkeadilan
5. Mewujudkan ketahanan agama, sosial, budaya, dan ekologi;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah;
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan daya saing daerah yang Tangguh dengan penerapan teknologi dan inovasi

Sebagai bagian dari RPJPD periode pertama, visi pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 adalah **“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”**. Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu: pokok visi *Maju* adalah Kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian, serta hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal; dan pokok visi *Sejahtera* menunjukkan Hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif. Dalam arti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur" yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Dalam arti, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat" yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan;
3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah. Dalam arti, membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui "Program Hilirisassi Sumber Daya Alam" atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha

dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Selain itu, meningkatkan produk daerah melalui "Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat" dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah;

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan. Dalam arti, mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) pada masing-masing desa melalui "Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan", dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah. Mengandung makna, pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui "Program Pengembangan Prasarana Transportasi" dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antarpulau dan kesatuan wilayah kabupaten;
6. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama. Mengandung makna, menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial; dan
7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Mengandung makna, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan melalui program "Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup", dalam rangka

mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

6.1.2.Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membangun desa, menata kota;
2. Kemandirian pangan;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT;
5. Penguatan kesetaraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Fokus pembangunan untuk mendukung pencapaian setiap prioritas diatas adalah sebagai berikut:

1. Prioritas membangun desa, menata kota, difokuskan pada huluisasi dan hilirisasi SDA, Pemasaran Produk UMKM berbasis teknologi digital,

- menata kawasan permukiman, menata kegiatan UMKM perkotaan serta menata PSU perkotaan;
2. Prioritas kemandirian pangan, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 3. Prioritas pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, difokuskan pada pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
 4. Prioritas penguatan pendidikan gratis PAUD - PT, difokuskan pada program bantuan gratis kepada peserta didik pada satua PUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa;
 5. Prioritas Percepatan penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, difokuskan pada kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;
 6. Prioritas penyehatan lingkungan dan bebas RTLH, difokuskan pada program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan sebagian dari penyebab kemiskinan;
 7. Prioritas pengentasan kemiskinan, difokuskan pada program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
 8. Prioritas penguatan fiskal daerah, difokuskan pada program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
 9. Prioritas pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah, difokuskan melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasiskan sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;

10. Prioritas hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, difokuskan pada pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;
11. Prioritas hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, difokuskan pada peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;
12. Prioritas pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, difokuskan pada pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Prioritas penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, difokuskan pada pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antarsuku dan antaragama;
14. Prioritas pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, disfokuskan pada pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Prioritas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, disfokuskan pada penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Prioritas pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, difokuskan pada penggalian dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan

- kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi;
17. Prioritas pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, difokuskan pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

6.1.3. Inovasi Daerah

Secara umum berlakunya otonomi daerah mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah kreatif mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Adanya kewenangan dalam mengelola sendiri daerahnya, maka Pemerintah Daerah menganggap paling mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Agar daerah itu bisa maju, maka harus berani membuat inovasi yang baru sesuatu yang belum pernah dirasakan masyarakat sebelumnya. Saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat saja, tetapi juga harus mampu menemukan terobosan-terobosan baru dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu faktor penunjang pencapaian kinerja kepala daerah, yaitu melalui inovasi daerah. Saat ini inovasi sudah menjadi kebutuhan Pemerintah Pusat dan daerah. Inovasi lahir dari kebiasaan atau budaya kerja pemerintah yang masih menggunakan cara lama sehingga dibutuhkan perubahan atau pembaruan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menghasilkan beberapa inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Judul Inovasi
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sistem Informasi Gerakan Efektif dan Efisien Data Pemuda Terpadu (SI GESIT)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Penanganan Kumuh Melalui Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah Sepuluh Hektar (SIRUMAHKU SEHAT)
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Alam Rumahku "Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Rumah Khusus:
4	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Optimalisasi Pembinaan Praja yang Humanis, Profesional dan Berintegritas (OPERASI TAS)
5	Dinas Lingkungan Hidup	Implementasi Program Kampung Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Tapak sebagai Upaya Membangun Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa (SIPP Desa)
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIP OK DEH)

Sumber: Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar, 2025

6.2. Keuangan Daerah

6.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komponen pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat yang di dalamnya memuat dana perimbangan, dana

insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa, selanjutnya adalah Transfer Antar Daerah yang memuat pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah berasal dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Realisasi dan target pendapatan daerah secara detail disajikan pada Tabel 6.2 berikut.

Tabel 6. 2 Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2024

Commented [10]: https://kepulauanselayarkab.go.id/asset/files/R_LPPD%20KAB.%20KEPULAUAN%20SELAYAR%20TAHUN%202024.pdf

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	1.021.771.355.235,53	1.028.401.417.400	822.896.624.075,59
Pendapatan Asli Daerah	54.417.747.197,53	77.299.516.400	81.074.651.968,59
Pajak Daerah	11.726.555.924,72	18.652.316.400	13.600.326.209,00
Retribusi Daerah	2.163.203.270,00	3.823.644.000	47.644.653.893,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.171.072.548,76	12.420.000.000	12.005.751.676,20
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.356.915.454,05	42.403.556.000	7.823.920.190,39
Pendapatan Transfer	953.675.230.094,00	917.472.518.000	741.821.972.107
Transfer Pemerintah Pusat	904.260.024.359,00	875.834.480.000	701.327.719.651
Dana Transfer Umum			
- DBH	24.223.459.668,00	16.164.393.000	15.401.372.000,00
- DAU	559.925.703.281,00	580.216.166.000	620.495.260.651,00
Dana Transfer Khusus	246.115.435.446,00	213.512.318.000	
Dana Insentif Daerah	2.950.221.000,00		
Dana Otonomi Khusus			
Dana Keistimewaan			
Dana Desa	71.045.205.000,00	65.941.603.000	65.431.087.000,00

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
Transfer Antar Daerah	49.415.205.699,00	41.638.038.000	40.494.252.456,00
Pendapatan Bagi Hasil	34.965.699.296,00	36.000.000.000	26.405.597.145,00
Bantuan Keuangan	14.449.506.403,00	5.638.038.000	14.088.655.311,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.678.377.944,00	33.629.383.000	
Hibah			
Dana Darurat			
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	13.678.377.944,00	33.629.383.000	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Secara keseluruhan, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan yang positif dan konsisten, total pendapatan daerah tahun 2024 mengalami penurunan cukup besar akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, terutama pajak dan retribusi daerah.

6.2.2. Belanja Daerah

Secara umum komponen belanja daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari : (1) Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Aset Lainnya; (3) Belanja Tidak Terduga; (4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun

mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas dan mendapatkan anggaran atau dengan istilah *money follow* program. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dan dalam tiga tahun terakhir upaya tersebut antara lain ditempuh dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

1. Melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial;
2. Melaksanakan *mandatory spending* yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan serta infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru;
4. Belanja hibah pada penyelenggara pemilihan umum dalam rangka membiayai pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024;
5. Pencapaian visi misi daerah yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun program pembangunan nasional;
6. Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan publik yang bermanfaat jangka panjang;
7. Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Realisasi dan target belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022-2024) disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6. 3 Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024

Uraian	Realisasi 2022(Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
BELANJA DAERAH	998.714.788.059,52	1.117.382.054.846,00	968.623.630.481,38
Belanja Operasi	664.869.638.253,52	727.943.191.122,00	752.276.889.134,38
Belanja Pegawai	354.916.349.730,52	400.304.410.703,00	421.937.421.030,76
Belanja Barang dan Jasa	271.167.735.291,00	311.145.057.110,00	284.692.232.048,62
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah	30.327.841.932,00	13.374.253.909,00	43.397.402.055,00
Belanja Bantuan Sosial	8.457.711.300,00	3.119.469.400,00	2.249.834.000,00
Belanja Modal	196.692.630.353,00	248.169.824.554,00	145.606.619.567,00
Belanja Tanah	1.886.851.800,00	368.828.000,00	512.154.500,00
Belanja Peralatan dan Mesin	40.530.407.319,00	20.106.678.500,00	18.146.622.784,00
Belanja Bangunan dan Gedung	74.323.315.084,00	139.365.175.233,00	71.973.982.522,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.055.523.650,00	88.044.142.821,00	54.397.846.811,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.896.532.500,00	65.000.000,00	334.572.950,00
Belanja Aset Lainnya		220.000.000,00	241.440.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.444.530.800,00	9.692.858.170	6.378.386.300,00
Belanja Transfer	135.707.988.653,00	131.576.181.000	64.361.735.480,00
Belanja Bagi Hasil	1.369.303.500,00	2.248.000.000	1.641.045.485,00
Belanja Bantuan Keuangan	134.338.685.153,00	129.328.181.000	62.720.689.995,00

Sumber: R-LPPD, 2025

Perkembangan realisasi belanja daerah tahun 2023–2024 nilainya mengalami penurunan, dimana pada tahun anggaran 2022 realisasi belanja daerah sebesar Rp. 998,7 Miliar lebih dan menjadi sebesar Rp. 968,6 Miliar lebih pada tahun anggaran 2024.

6.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan bagian yang sama pentingnya dengan bagian pendapatan dan belanja. Apabila terjadi surplus anggaran, maka alokasi penggunaannya dilaksanakan melalui pos-pos yang ada dalam pembiayaan. Demikian pula apabila terjadi defisit yang tidak bisa lagi ditutup dengan menaikkan pos-pos yang ada dalam struktur pendapatan, maka diupayakan ditutup melalui pos yang terdapat dalam bagian pembiayaan. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan daerah terdiri atas : (1) Penerimaan pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pengeluaran pembiayaan daerah didalamnya yang terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6. 4 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2024

Commented [11]:

Uraian	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
PEMBIAYAAN DAERAH			
Penerimaan Pembiayaan	66.660.837.653,41	89.793.068.500,42	45.846.626.145,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	66.449.227.508,41	89.717.404.819,42	45.813.525.076,18
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	206.006.345,00	75.663.671,00	33.101.069,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.603.800,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	--	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo			
Penyertaan Modal Daerah			
Pembentukan Dana Cadangan			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			
PEMBIAYAAN NETTO	66.660.837.653,41	89.793.068.500,42	45.846.626.145,18

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, 2025

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan pada periode 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 66,66 Milyar lebih dan Rp. 89,79 Milyar lebih. Selanjutnya pada tahun 2024 sebesar Rp. 45,84 Milyar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 adalah Rp. 0 dan tahun 2023 sebesar Rp. 0, serta pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 0

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Profil Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik serta dapat meningkatkan investasi sehingga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

Tersusunnya profil pembangunan tahun 2024, diharapkan mampu menjadi sumber data untuk mendorong percepatan perencanaan pembangunan daerah dengan memaksimalkan potensi Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai kabupaten maritim. Beberapa sektor yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain adalah pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dengan potensi peningkatan produksi beras, kelapa, cengkeh dan lain-lain; pengembangan sektor perikanan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya; pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan keberadaan Taman Nasional Takabonerate; serta pengembangan industri dan perdagangan untuk pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

7.2. Rekomendasi

Profil pembangunan daerah dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan oleh para pemangku kepentingan, khususnya dalam menyusun program/ kegiatan berdasarkan dengan isu strategis, permasalahan dan capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyusunan profil pembangunan daerah untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama, sehingga profil pembangunan yang disusun pada masa yang akan datang dapat disempurnakan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku.